

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bangsa Petani (baca; bangsa Agraris) adalah identitas sosial sekaligus politik, yang melekat dan menjadi urat pada proses kebangsaan Indonesia. Sebagai *nation*, identitas kepetanian terlahir dari relasi yang kerap berbenturan antarsejarah, nilai, pandangan, kepentingan, juga ideologi. Menurut Huntington, bahwa ada masyarakat yang terpisah karena adanya perbedaan budaya, tetapi ada juga masyarakat yang semakin erat hubungannya, karena adanya kesamaan kultur dan nilai. Pengotakan ini terjadi, karena alasan-alasan ideologis dan arah kekuasaan yang menjadi jalan bagi kesejajaran kebudayaan. Lebih jauh Huntington mengatakan bahwa ikatan etnik, keagamaan, dan sivilisasional, akan semakin menguatkan ikatan politik.<sup>1</sup>

Menjadi bangsa Petani,<sup>2</sup> merepresentasikan relasi yang menyejarah antara anggota masyarakat, yang mengalami pasang surut dalam pengidentitasan kelompok secara sosial dan politik. Dalam konteks Indonesia kekinian, petani sebagai identitas sosial-politik mengalami penderdilan dan pendistorsian pengakuan oleh kekuasaan. Petani dengan persoalan hidupnya,<sup>3</sup> berhadapan dengan kekuasaan yang cenderung melemahkan posisi mereka, baik secara ekonomi, sosial, dan politik. Pelemahan ini dilakukan sebagai bagian dari skenario besar ekonomi-politik nasional yang berada di bawah kontrol ekonomi global.

Ekonomi global telah meminggirkan peran petani hanya sebagai penghasil dan penjaga rantai pertanian. Petani tidak dianggap sebagai sebuah kekuatan sosial yang memiliki posisi tawar yang besar, yang dapat menentukan pola pertanian,

---

<sup>1</sup> Lihat Huntington . *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, diterjemahkan oleh M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam, 2003, hal. 217

<sup>2</sup> Bangsa Petani bermakna sosial historis politik, yang mewakili kesejarahan masyarakat Indonesia yang bergerak ke arah penguatan identitas dan martabat kebangsaan.

<sup>3</sup> Persoalan yang sering dihadapi petani Indonesia adalah kelangkaan pupuk, fungsi dam/pengairan yang tidak maksimal, dan harga gabah yang tidak seimbang dengan biaya produksi, serta tidak berpihaknya pasar karena masuknya beras impor.

jenis produksi, dan pemasaran. Yang terjadi sebaliknya, petani adalah pasar bagi kekuatan modal.

Pada sisi lain, petani memiliki kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat yang mengonsumsi nasi (beras) sebagai makanan pokok, menyebabkan keberadaan petani sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan, berarti adanya ketersediaan dan pengamanan stok produk pertanian yang berlangsung secara jangka panjang.

Pada periode pelaksanaan proyek swasembada pangan oleh Pemerintah Suharto, produksi padi yang dihasilkan dari tanah persawahan sebanyak 32.013.817 juta ton. Pertumbuhan produksi yang terjadi selama tahun 1980-1984 adalah sebesar 6,92%. Tetapi, selama empat tahun kemudian, pertumbuhan berjalan lambat, yakni sebesar 2,85%. Dua puluh satu tahun kemudian, prosentase pertumbuhan merosot menjadi 1,01%. Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan daerah luar Jawa,<sup>4</sup> mengalami penurunan (Khudori, 2008, 39). Hanya Kalimantan yang justru mengalami peningkatan prosentase dari 2,21% pada tahun 1980-1984, menjadi 3,28% pada tahun 1995-2001.

Penurunan produksi padi, terjadi justru pada saat pemerintahan Orde Baru sedang melaksanakan swasembada pangan. Data-data dalam Tabel 1.1, menguatkan pandangan bahwa konsep pembangunan ekonomi Orde Baru, tidak memiliki fondasi ekonomi yang kuat, yang berbasiskan pada kemampuan petani memproduksi padi.

---

<sup>4</sup> Luar Jawa, berarti daerah yang belum tersebut dalam Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Produksi Padi Sawah di Indonesia 1980-2001**  
(ton)

Wilayah	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-2001
Indonesia	32.013.817 (6,92)	38.884.810 (2,85)	43.417.593 (1,06)	47.624.636 (1,01)
Jawa	20.498.201 (7,11)	24.303.160 (2,16)	25.840.263 (-0,08)	27.247.359 (0,62)
Sumatera	5.882.744 (7,17)	7.551.316 (4,06)	9.193.219 (3,29)	10.578.903 (1,45)
Kalimantan	1.412.974 (2,21)	1.565.418 (2,56)	1.900.750 (3,75)	2.346.508 (3,28)
Sulawesi	2.502.863 (7,81)	3.474.693 (4,90)	4.195.365 (2,24)	4.930.332 (0,79)
Luar Jawa	11.515.616 (6,62)	14.581.650 (4,02)	17.577.330 (2,77)	20.377.277 (1,54)

Keterangan: Angka dalam kurung merupakan laju pertahun (%)

Sumber: Jurnal Agro Ekonomi. Vol 22 No. 1, Mei 2004, 74-95

Kualitas gabah yang dihasilkan dalam setiap panen, merupakan potret dari seberapa besar kepedulian pemerintah terhadap petani. Ketersediaan bibit, pengairan, pupuk, dan obat-obatan padi adalah bentuk dari kepedulian pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian. Dan yang lebih penting lagi adalah, seberapa besar perhatian dan keterlibatan partai politik dalam memperjuangkan harga gabah dan lain-lain yang menyangkut hajat hidup petani.

Hasil pertanian tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan politik dari elit politik yang sedang berkuasa. Keberhasilan program-program pertanian, dianggap sebagai kemampuan pemerintah dalam mengapresiasi dan mengimplementasikan konsep negara agraris. Pemerintah dapat mengklaim dan menyosialisasikan bahwa kepeduliannya kepada petani sangat besar. Dan, biasanya, keberhasilan ini menjadi nilai jual untuk kampanye pemilu berikutnya.

Petani menjadi komoditas politik pada setiap orde kekuasaan. Keadaan ini lahir dan berangkat dari kenyataan sosiologis, bahwa sesungguhnya, keagrarian Indonesia tetap diakui. Pengakuan ini dalam kerangka berpikir elit politik yang memanfaatkan konsepsi keagrarian sebagai penopang *status quo*. Petani tidak dianggap sebagai kelompok sosial yang harus diperjuangkan nasibnya, melainkan justru dimanfaatkan sebagai legitimasi dalam memperoleh dan menjaga kekuasaan.

Lahan pertanian yang masih luas, menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung penuh pada pertanian. Dari rentang waktu 20 tahun, ketersediaan lahan sawah cukup terjaga. Data-data dalam Tabel 1.2, memperlihatkan terjaganya luas sawah pada 1980 hingga 2001. Tahun 1990-1994 terjadi peningkatan luas sawah menjadi 8.352.434, namun kembali menurun selama empat tahun ke depan. Tetapi, secara keseluruhan, luas lahan sawah di Indonesia tetap dapat dipertahankan, walaupun angka pertumbuhan setiap tahunnya, mengalami penurunan.

Akan tetapi, tersedianya lahan di atas, tidak bertahan lama, karena pada tahun-tahun berikutnya, terjadi pembebasan lahan pertanian yang digunakan untuk daerah industri; perumahan, perkantoran, dan pembangunan mal-mal. Pada tahun 2000, luas ruang untuk pusat perbelanjaan baru, mencapai 1.400.000 meter persegi. Luas ini meningkat menjadi 4.500.000 m<sup>2</sup> pada tahun 2006.<sup>5</sup> Keadaan ini dipermudah dengan UU Agraria yang memang membolehkan negara, atas nama kepentingan umum, melakukan pembebasan lahan penduduk dengan pemaksaan melalui pengadilan.

---

<sup>5</sup> Lihat Sri Palupi di Surat Kabar Harian Kompas, 23 Juli 2007. Hal 41

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Luas Baku Sawah di Indonesia 1980-2001**  
**(hektar)**

Wilayah	1980-1984	1985-1999	1990-1994	1995-2001
Indonesia	7.918.943 (8,87)	7.918.943 (2,12)	8.352.434 (0,72)	7.935.219 (-1,84)
Jawa	3.473.457 (22,28)	3.446.838 (-0,06)	3.418.135 (-0,18)	3.287.709 (-1,02)
Sumatera	1.941.937 (4,29)	2.117.997 (3,39)	2.340.721 (2,14)	2.301.360 (-2,33)
Kalimantan	914.914 (2,81)	1.163.679 (6,56)	1.316.736 (0,28)	1.050.564 (-8,24)
Sulawesi	715.813 (3,03)	793.437 (2,13)	867.197 (1,77)	834.638 (-1,61)
Luar Jawa	3.939.514 (3,43)	4.472.105 (3,85)	4.934.299 (1,34)	4.647.510 (-2,43)

Keterangan: Angka dalam kurung merupakan laju pertumbuhan per tahun (%)

Sumber: Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 22 No.1, Mei 2004, 74-95.

Sistem ekonomi Neoliberal yang mulai dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru, telah menyebabkan rusaknya sistem kerja pertanian tradisional.<sup>6</sup> Petani tidak lagi menjadi pihak yang punya otoritas atas diri dan lingkungannya. Sebaliknya, petani menjadi pasar, sekaligus objek dari relasi modal yang dijalankan oleh lembaga keuangan internasional. Hal ini dapat dicermati dari tulisan Boni Setiawan yang menguraikan terjadinya proses pengerdilan petani yang direstui oleh negara yang tidak memiliki posisi tawar di hadapan lembaga keuangan internasional<sup>7</sup>:

<sup>6</sup> Lemahnya otoritas petani terhadap sawahnya, sudah dimulai sejak jaman Kolonial Belanda, ketika petani dipaksa untuk menanam jenis pertanian yang laku di pasaran internasional.

<sup>7</sup> Lihat paper Boni Setiawan, Ekonomi Pasar Bebas yang Neo-Liberalistik versus Ekonomi Berkeadilan Sosial, Jakarta: IGJ, 2006, hal. 7

Lewat LoI (*letter of intents*) Oktober 1997 dan MEFP<sup>8</sup> 11 September 1998, IMF menuntut diberlakukannya tarif impor beras sebesar 0%. Ini juga berlaku bagi jagung, kedelai, tepung terigu, dan gula. Selain itu LoI juga mengatur agar Bulog tidak lagi mengurus kestabilan harga pangan dan agar melepaskannya ke mekanisme pasar. Bulog dibatasi menjadi sebatas perdagangan beras, itupun harus bersaing dengan pedagang swasta. Liberalisasi juga telah diberlakukan dalam hal harga pupuk dan sarana produksi padi lainnya, yang tidak lagi disubsidi pemerintah, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar. Liberalisasi pertanian sebenarnya juga bagian dari ratifikasi Indonesia atas *Agreement on Agriculture (AOA)* dari WTO, yang mengatur penghapusan dan pengurangan tarif serta pengurangan subsidi.

Seharusnya, pemerintah melakukan proteksi pertanian, sebagaimana yang dilakukan oleh negara maju terhadap pertaniannya. Pemerintah Indonesia, justru melakukan kebijakan pertanian yang merugikan petani. Petani Indonesia semakin terjebak dalam kemiskinan struktural. Kebijakan Impor Beras, kelangkaan pupuk, paceklik, dan persoalan lain yang khas petani, menunjukkan terjadinya relasi sosial-politik yang timpang antara petani, pemerintah, dan elit politik lainnya. Adalah kekuatan pasar yang mendominasi dan bahkan menjadi pusat dalam

---

<sup>8</sup> *Memorandum of Economic and Financial Policies* adalah surat yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral atas nama Pemerintah kepada Direktur IMF. Isinya mengandung rencana kerja dan rencana tindak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bentuknya memang dibuat seolah-olah berdasarkan keinginan Pemerintah Indonesia, namun rancangan surat tersebut keseluruhannya dibuat oleh IMF. Menurut Muhammad Nurudin, IMF menekan pemerintah Indonesia supaya segala bentuk kontrol harga kontrol distribusi semua produk pertanian dihapuskan, penghapusan pembatasan impor produk pertanian dan melakukan privatisasi terhadap Bulog. Keseluruhan proses tersebut dituangkan dalam MEFP yang diterbitkan bersama LoI antara pemerintah Indonesia dengan IMF pada tanggal 31 Oktober 1997. Dalam paragraf 41 yang memuat bagian reformasi struktural dan privatisasi dalam MEFP, pemerintah Indonesia akan melepaskan kontrol pada harga pertanian kecuali harga beras, gula dan tembakau. Pada tanggal 1 Januari 1998, dikarenakan desakan IMF, harga beras, gula dan tembakau dinaikkan. Laporan tersebut bersamaan dengan penandatanganan MEFP tanggal 24 Juni 1998. Lihat Muhammad Nurudin, 'Hak atas Pangan, Memahami Situasi', dalam [www. api.or.id](http://www.api.or.id), 2 Juni 2009

proses relasi ekonomi-politik yang merugikan petani. Dalam kenyataannya, pasar melalui lembaga keuangan internasional berhasil memainkan perannya dalam mengintervensi dan menguasai perekonomian Indonesia.

Kemiskinan struktural yang dialami oleh petani Indonesia pasca-Orde Baru adalah kemiskinan yang merupakan hasil desain besar dari berbagai kelompok kepentingan. Petani miskin, bukan karena kondisi internal dalam diri petani, melainkan karena berlangsungnya struktur sosial yang memarginalkan petani. Pemerintah dan elit politik lainnya, membutuhkan lapisan kelas sosial bawah, sebagai penopang yang mampu menegaskan eksistensi politiknya dalam masyarakat dan negara.<sup>9</sup>

Jumlah rumah tangga petani yang masih tinggi, yang ditunjukkan dalam Tabel 1.3 di bawah ini, sesungguhnya merupakan 'lahan emas' bagi kekuasaan dalam memperebutkan dukungan petani. Setidaknya dalam setiap pemilu, petani menjadi penentu kemenangan sebuah partai politik, di tingkat lokal maupun nasional. Pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada telah menjadi panggung politik yang menegaskan pentingnya keberadaan kelompok petani.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Keluarga Petani Indonesia**

Uraian	Sensus 1993 (juta)	Sensus 2003 (juta)	Kenaikan
Jumlah RT Petani	20,8	25,4	2,2%/tahun
Jumlah Petani Gurem	10,8	13,7	2,6%/tahun
Porsi Petani Gurem	52,7%	56,5%	-
Porsi Petani Gurem di Jawa	69,8%	74,9%	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2004

<sup>9</sup> Mansour Fakih mengistilahkan kemiskinan jenis ini sebagai pemiskinan. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami proses dehumanisasi dan pemiskinan. Kekayaan negara yang dijual dengan dalih privatisasi, merupakan representasi dari proses pemiskinan. Lebih jelas lihat Mansour Fakih, *Tuhan tidak Mengubah Nasib Kaum Miskin Kalau Mereka tidak Merebutnya*, Prolog untuk buku *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.

Petani telah menjadi bagian dari keseluruhan proses pemilu yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan politik, apalagi dengan berlakunya sistem suara terbanyak sebagai prasyarat perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2009. Dalam hal ini, petani menjadi sumber rebutan klaim atau pengaruh yang dilakukan oleh para elit politik. Pada Tabel 1.4, dapat diketahui perolehan suara partai-partai yang merupakan hasil konstestasi dalam setiap pemilu, di mana petani menjadi salah satu kelompok besar yang diperebutkan.

Petani merupakan kelompok masyarakat yang memberikan kontribusi suara paling besar. Menurut Imansyah Rukka,<sup>10</sup> tahun 1983 ada 19,5 juta rumah tangga pertanian, kemudian naik menjadi 21,5 juta pada tahun 1993, dan tahun 2008, diperkirakan sekitar 24 juta. Kalau ada tiga orang dewasa (suami, istri, dan satu anak yang bisa ikut pemilu) atau empat orang (dengan dua anak) untuk setiap rumah tangga tani, maka ada 72-96 juta petani calon pemilih pemilu dari petani.<sup>11</sup>

Menurut Khudori, dengan jumlah pemilih petani yang besar, maka petani menjadi tiket bagi para politisi untuk duduk di legislatif maupun eksekutif:

Dari semua komunitas pinggiran itu, petani memiliki posisi cukup penting. Pelaku politik mana pun tahu pertanian masih menjadi rebutan 43 persen tenaga kerja Indonesia dan ditekuni 28,3 juta rumah tangga petani (113,2 juta jiwa). Petani dan pertanian adalah lumbung suara yang bisa menyediakan tiket untuk menduduki kursi presiden/wakil presiden dan kursi legislatif.<sup>12</sup>

Dalam sejarah Golkar, Pemilu 1999, merupakan 'masa kelam', yang membalikkan dominasi politiknya menjadi 'pecundang' secara nasional. Berdasarkan data dalam Tabel 1.4, Golkar mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Posisi Golkar diambil alih oleh PDI

<sup>10</sup> Direktur Eksekutif Petani Center

<sup>11</sup> Dikutip dari Imansyah, *Petani dan Pertanian sebagai Komoditas Politik*, dalam <http://cetak.fajar.co.id/news.php>, 22 Oktober 2008

<sup>12</sup> Dikutip dari artikel Khudori, *Calon Presiden, Pemilu, dan Petani*. <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik>. 24 Juni 2009



Perjuangan yang memperoleh 153 kursi, sementara Golkar 120 kursi, PPP 58 kursi, selebihnya terbagi ke partai lainnya. Akan tetapi, Golkar tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali tampil sebagai partai nomor satu di Indonesia. Pemilu 2004, suara yang hilang, kembali direbut Golkar, sementara PDI Perjuangan berada di urutan kedua, dan PPP di urutan ketiga.

Fenomena Pemilu 1999 dan 2004, mengalami perubahan panorama pada Pemilu 2009. Dengan kontestan parpol yang berubah-ubah, --walaupun aktor-aktornya tidak berubah-- menghadirkan wajah lain dari perpolitikan Indonesia. Adalah Demokrat sebagai partai yang baru hadir di pentas politik pada Pemilu 2004, dalam waktu yang relatif pendek, telah menggeser dominasi partai-partai besar. Pemilu 2009 menjadi canang terjadinya dominasi baru dalam perpolitikan Indonesia. Dengan perolehan kursi 150, Demokrat telah meninggalkan jauh Golkar, PDI Perjuangan, dan terutama PPP. Kemudian, terdapat dua partai baru yang berhasil melewati ambang *parliamentary threshold* (PT) adalah Gerindra dan Hanura, yang diperkirakan memperoleh 'limpahan' pemilih Golkar yang beralih. Sementara beberapa partai yang tidak mencapai PT, terpaksa harus berada di pinggir arena kekuasaan parlemen.

**Tabel 1.4**  
**Perolehan Suara Parpol DPR RI**  
**(Pemilu 1999, 2004, 2009)**

<b>Parpol</b>	<b>1999</b>	<b>2004</b>	<b>2009</b>
Golkar	23.741.749 (120)	24.461.104 (128)	15.037.757 (107)
PDIP	35.689.073 (153)	20.710.006 (109)	14.600.091 (95)
PPP	11.329.905 (58)	9.226.444 (58)	5.533.214 (37)
PKB	13.336.982 (51)	12.002.885 (52)	5.146.122 (27)
PAN	7.528.956 (34)	7.255.331 (53)	6.254.580 (43)
Partai Keadilan (PKS)	1.436.565 (7)	8.149.457 (45)	8.206.955 (57)
PBB	2.049.708 (13)	2.965.040 (11)	Tidak lolos PT
Demokrat	Belum ada	8.437.868 (55)	21.703.137 (150)
PBR	Belum ada	2.944.529 (14)	Tidak lolos PT

Parpol	1999	2004	2009
PDS	Belum ada	2.424.319 (13)	Tidak lolos PT
Gerindra	Belum ada	Belum ada	4.646.406 (26)
Hanura	Belum ada	Belum ada	3.922.870 (18)

Keterangan:

- Dalam kurung jumlah perolehan kursi
- Parpol kecil yang tidak memperoleh minimal 5 kursi, tidak dicantumkan dalam tabel, termasuk yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* (PT).

Sumber: Website KPU Pusat dan Pusat Data Cetro, yang diolah kembali.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dua kali pemilu yang digelar pasca-Reformasi, NTB tetap menjadi daerah basis Golkar.<sup>13</sup> Pada Pemilu 1999, Golkar memperoleh 735.733 (42.17%), sementara PDI Perjuangan yang memperoleh kemenangan di sebagian besar pulau Jawa, Kalimantan, Bali, NTT, dan sebagian Sumatera, hanya memperoleh suara 231.654 (13.27%). Sebagai partai pemenang di tingkat nasional, PDI Perjuangan tidak berhasil mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat NTB. Demikian halnya dengan PPP sebagai partai Islam, tetap menempati urutan ketiga. Perolehan suara PPP 198.429 (11.37%), disusul oleh partai Islam lainnya yang baru dibentuk, seperti PAN 71.520 (4.10%), dan PBB 66.571 (3.81%).<sup>14</sup>

Pada Pemilu 2004, sepuluh kursi DPR RI yang diperebutkan, tiga diantaranya diperoleh Golkar. Tujuh kursi lainnya, diperoleh PDI Perjuangan, PBB, PPP, PBR, PAN, PKS, dan Demokrat. Perolehan suara masing-masing partai yang mengantarkan wakilnya ke DPR RI, merupakan gambaran kekuatan politik parpol di akar rumput.

<sup>13</sup> Pada Pemilu 2009, untuk perolehan suara DPR RI, posisi Golkar menempati urutan ke-2, setelah Demokrat

<sup>14</sup> Data diperoleh dari beberapa sumber; website KPU dan <http://pemilu.detiknews.com>, 25 April 2009.

Golkar sebagai parpol yang pernah berkuasa pada masa Orba, kembali menunjukkan kekuatan dirinya sebagai partai pemenang, sekalipun pada Pemilu 1999 terjadi penurunan jumlah pemilihnya, Golkar tetap eksis sebagai parpol pemenang pemilu. Posisi Golkar kembali menguat pada Pemilu 2004, sebaliknya, PDI Perjuangan, dan PPP mengalami penurunan jumlah suara. Bahkan, posisi PDI Perjuangan dapat disanding oleh partai-partai baru, seperti PAN, PBB, PBR.

Kecilnya perolehan suara PDI Perjuangan di NTB pada Pemilu 1999 dan 2004, mengisyaratkan bahwa Reformasi 98 tidak sepenuhnya berhasil melemahkan citra dan dominasi Golkar dalam ranah politik rakyat. Gaung reformasi dengan segala tuntutan, tidak berhasil memunculkan kesadaran dan sikap politik yang berbeda dan kritis di kalangan rakyat. Masyarakat petani tetap menjadikan Golkar sebagai pilihan politik dalam dua kali pemilu pada tahun 1999 dan 2004. Bahkan pada Pemilu 2009, Golkar dengan perolehan 2 kursi DPR RI, hanya tersaingi oleh Demokrat yang memperoleh 3 kursi untuk DPR RI. Sementara, PDI Perjuangan 1 kursi,<sup>15</sup> PPP 1 kursi, PAN 1 kursi, PKS 1 kursi, dan Hanura 1 kursi.<sup>16</sup>

Adalah Bima yang dalam penelitian ini akan direpresentasikan oleh Kota Bima,<sup>17</sup> memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Golkar, bahkan bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang berada di NTB, perolehan suara Golkar di Bima termasuk sangat tinggi.<sup>18</sup> Perolehan terbesar dari Kab. Dompu (54,8%), Kab. Bima (52,1%), Kab. Lombok Tengah (50,1%), Kab. Lombok Timur (44,0%), Kab. Sumbawa (39,7%), dan Kab. Lombok Barat (29,1%). Hanya di Kota Mataram, Golkar tidak sanggup mempertahankan dominasinya, posisinya tergantikan oleh PDI Perjuangan yang memperoleh 30,4% suara. Kemenangan Golkar dengan lambang pohon beringin kuningnya, telah menghegemonik pikiran

---

<sup>15</sup> Dibandingkan Pemilu 2004, terjadi penurunan suara PDI Perjuangan, sekitar 30.000 ribu.

<sup>16</sup> Data diperoleh melalui [Http://www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), 25 April 2009.

<sup>17</sup> Penyebutan kota di sini hanya sebagai administrasi pemerintahan. Karena secara sosial, kehidupan masyarakat Kota Bima, terutama kelurahan-kelurahan yang berada di pinggiran, masih bercorak pedesaan secara kultur dan sosial. Penyebutan Bima dalam penelitian ini lebih mewakili keseluruhan suku Mbojo secara sosial-politik yang berada di Kota dan Kabupaten Bima. Dan pemekaran Bima menjadi dua pemerintahan daerah (kabupaten dan kota), baru berlangsung tahun 2002 berdasarkan UU No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bima di NTB

<sup>18</sup> Terkecuali pada Pemilu 2009, Kota dan Kabupaten Bima, dan NTB secara keseluruhan dimenangkan oleh Demokrat. Golkar menempati urutan kedua.

dan kesadaran politik masyarakat Bima. Dalam setiap pemilu, Golkar tampil sebagai partai pilihan warga.

Secara sosiologis, kemenangan parpol dalam pemilu merupakan gambaran yang menyeluruh dari relasi sosial-politik dengan masyarakat (pemilih). Petani sebagai kelompok masyarakat yang dominan dalam jumlah, memiliki posisi strategis dalam menentukan kemenangan parpol dalam pemilu. Posisi ini tidak hanya diimplementasikan dalam pemberian suara di bilik-bilik TPS (tempat pemungutan suara), melainkan pada keseluruhan relasi yang terjalin bersamaan dengan keberpihakan, keberadaan, dan dinamika internal parpol. Kemenangan parpol sangat ditentukan oleh kebijakan dan pendekatan, baik secara sosial maupun ekonomi kepada petani.

Sebagai daerah dengan mayoritas petani, di mana sebanyak 72% masyarakat Kabupaten Bima menggantungkan hidupnya sebagai petani tanaman pangan.<sup>19</sup> Begitu juga dengan penduduk di Kota Bima yang berjumlah sebesar 116.295 jiwa, yang bermata pencaharian petani cukup tinggi. Jumlah petani 15.337 orang, nelayan 425 orang, peternak 13.489 orang, penggalan 435 orang, industri kecil 1.952 orang, industri besar/ sedang 76 orang, perdagangan 1.401 orang, ABRI 304 orang, guru 1.567 orang, dan PNS berjumlah 2.443 orang.<sup>20</sup>

Bima memiliki persoalan pertanian yang kompleks, yang membutuhkan perhatian dari pemerintah dan partai politik. Persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh petani Bima hampir sama dengan persoalan yang dihadapi petani daerah lain. Keadaan ini menjadi sangat menarik dan penting untuk diteliti. Karena pada dasarnya, keberadaan dan kemenangan parpol seiring dengan terjaganya harapan pemilih terhadap partai tersebut. Pada saat menjatuhkan pilihan pada Golkar, atau

---

<sup>19</sup> Disampaikan oleh Wakil Bupati Bima, Usman AK dalam <http://www.bimakab.go.id>, 29 Juni 2009

<sup>20</sup> Diambil dari <http://bappedabima.wordpress.com>, 29 Juni 2009

partai lainnya, tentu para petani memiliki harapan terjadinya kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, dalam setiap pemilu, kehidupan petani tetap saja miskin.

Berdasarkan pemetaan politik pada Pemilu 1999, 2004, dan perkembangan hasil Pemilu 2009 di atas, penelitian ini akan dikembangkan pada analisa relasi politik yang berlangsung antara petani dengan parpol peserta pemilu, dan elit politik lokal di Bima. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah: Bagaimana pola relasi politik antara petani dengan parpol? Mengapa petani melibatkan diri dalam relasi politik melalui pemilu? Apakah birokrasi desa dan tokoh masyarakat berperan dalam menentukan pilihan politik petani?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Menganalisa proses terbentuknya pola relasi politik petani dengan parpol..
- 2) Menganalisa alasan petani dalam melakukan relasi politik dengan parpol dalam pemilu
- 3) Menganalisa peran birokrasi desa dan tokoh masyarakat dalam menentukan pilihan politik petani dalam pemilu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menyumbangkan temuan yang berarti dan strategis yang dapat dijadikan referensi bagi ilmu Sosiologi Politik. Partisipasi politik petani, pola relasi, dan cara kerja mesin partai dalam pemilu di pedesaan menjadi persoalan-persoalan yang seharusnya dibongkar pasang, sehingga ditemukan konsepsi yang merepresentasikan perkembangan masyarakat.

Di samping untuk kepentingan akademik, penelitian ini, juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi partai politik, dalam memaksimalkan peranannya di Indonesia, khususnya di NTB, sehingga relasi yang terbentuk, dapat berbasiskan pada kepentingan yang menyeluruh. Hasil penelitian ini, sekaligus dapat menjadi pegangan bagi ormas, LSM, dan pihak yang konsen pada masalah petani dalam

memajukan kesadaran politik petani, sehingga transformasi demokrasi tidak terhenti pada pemilu semata, melainkan dapat meningkatkan posisi tawar petani di hadapan elit politik.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini mengambil seting sosial-politik pada situasi menjelang Pemilu 1999, 2004, dan 2009,<sup>21</sup> yang direpresentasikan oleh pemerintahan Suharto<sup>22</sup>, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Batasan persoalannya adalah yang menyangkut kehidupan sosial-politik petani, termasuk pandangan dan penilaian petani terhadap pemerintahan dan pelaksanaan pemilu.

### **1.6 Model Operasional Penelitian**

Negara sebagai institusi besar yang merepresentasikan kekuatan sosial-politik yang diwakili oleh pemerintah dan warga negara, memiliki legitimasi dan wewenang dalam memutuskan kebijakan-kebijakan politik. Dalam konteks ini, pemerintah dipersonifikasi sebagai negara diposisikan sebagai institusi yang paling bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi-politik. Adalah

Kekuatan modal yang diwakilkan oleh lembaga keuangan internasional (IMF, WTO, Bank Dunia ) melakukan ekspansi modal melalui intervensi politik yang menyebabkan negara menjadi lemah. Sementara pasar sebagai institusi ekonomi-politik, mewakili kepentingan berbagai kelompok sosial yang berbeda. Pada kenyataannya, pasar menjadi arena sosial-politik yang ditentukan oleh kekuatan modal yang menggunakan negara sebagai perantara. Ketiga kekuatan ini, memiliki dan memainkan peran masing-masing.

---

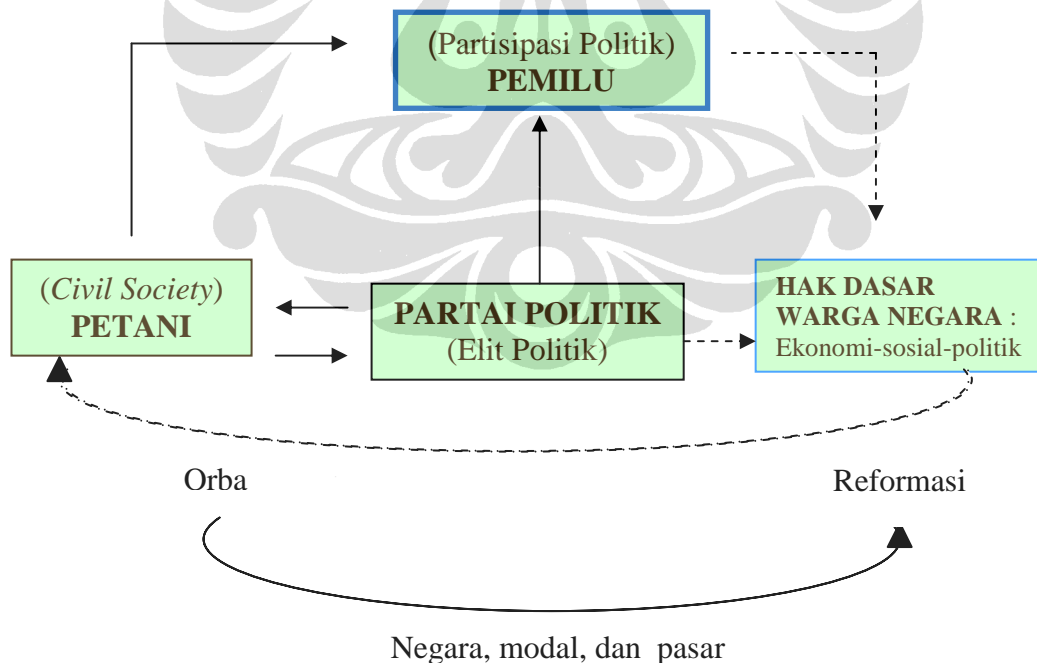
<sup>21</sup> Pemilu 2009, bukan seting utama, melainkan peristiwa pembandingan.

<sup>22</sup> Walaupun sudah terjadi pergantian kekuasaan melalui Reformasi 98, namun Suharto sebagai kekuatan politik masih eksis dan dominan.

Adalah Orba sebagai sistem pemerintahan, menjadi bagian dari berlangsungnya keadaan dan relasi politik, hingga terjadinya Reformasi 98. Dalam hal ini, Orba dan Reformasi 98 menjadi era perpolitikan yang saling terkait, yang memiliki hubungan. Kelahiran Reformasi merupakan titik balik dari situasi politik yang terjadi pada jaman Orba.

Relasi politik yang berlangsung antara petani sebagai *civil society* dengan parpol, yang direpresentasikan juga oleh elit politik lainnya (birokrasi, tokoh masyarakat) berlangsung pada pemerintahan Indonesia pasca-Reformasi 98. Hubungan ini, diimplementasikan secara nyata melalui partisipasi dalam pemilu yang mempunyai orientasi terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan politik petani sebagai warga negara.

Relasi politik (tanda panah) dalam skema di bawah ini, menunjukkan adanya interaksi langsung antara berbagai pihak. Sementara tanda panah yang terputus-putus menunjukkan orientasi dari sebuah hubungan.



Keterangan:

- ▶ Relasi politik
- - -▶ Orientasi relasi